

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	ii
ABSTRAK	1
ABSTRACT	1
PENDAHULUAN	2
METODE	3
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	4
KESIMPULAN	9
UCAPAN TERIMA KASIH.....	9
KONTRIBUSI PENULIS	9
DAFTAR PUSTAKA	10
LAMPIRAN.....	11
Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pembimbing	11
Lampiran 2. Keterangan Kontribusi Anggota Tim dalam Pekerjaan dan Penulisan	22
Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana.....	23
Lampiran 4. Pernyataan Sumber Tulisan	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kesigapan Pemerintah Provinsi Menyediakan Pelayanan Kesehatan	5
Gambar 1.2 Pemerintah Provinsi Tidak Diskriminatif dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan.....	6
Gambar 1.3 Pemerintah Provinsi Memperhatikan Kesehatan Tenaga Medis	7
Gambar 1.4 Pemerintah Provinsi Memperhatikan Kesejahteraan Tenaga Medis ..	8
Gambar 1.5 Pemerintah Telah Menyediakan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Para Tenaga Medis.....	8

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA, JAWA TIMUR, DAN SULAWESI SELATAN DALAM PENANGANAN COVID-19

Aulia Utami Dikayarizqi^{1*}, Nur Harfi Oktaviani², Siti Amalia³

¹ Mahasiswi Universitas Indonesia, Depok

² Mahasiswi Universitas Indonesia, Depok

³ Mahasiswi Universitas Indonesia, Depok

*Corresponding author: aulia.utami@ui.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan dalam penanganan COVID-19 dengan menggunakan teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif yaitu melalui survei, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan dalam penanganan COVID-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi positif terhadap kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan dalam penanganan COVID-19 dengan persentase persepsi positif mencapai 72% dari total keseluruhan responden.

Kata-kata kunci: Pemerintah Provinsi, Persepsi, Kebijakan, COVID-19

ABSTRACT

This study examines the Public Perception of DKI Jakarta, East Java, and South Sulawesi's Local Government Benevolence in Handling COVID-19 using quantitative and qualitative data collection techniques, where research data is obtained through surveys, interviews, and literature review. The aims of this study is to analyze how the Public Perception of DKI Jakarta, East Java, and South Sulawesi's Local Government Benevolence in Handling COVID-19. The results of this research showed that public have a positive perception of DKI Jakarta, East Java, and South Sulawesi's Local Government Benevolence in Handling COVID-19 with a percentage of positive perception that reach out 72%.

Keywords: Local Government, Perception, Benevolence, COVID-19

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 saat ini telah terjadi pada hampir seluruh negara di dunia, takterkecuali Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara positif COVID-19 dengan kasus pertamanya yakni pada 2 Maret 2020. Seiring berjalannya waktu, penambahan kasus mengenai COVID-19 semakin masif. Dilansir dari covid19.go.id, hingga Senin (23/11/2020) jumlah total terkonfirmasi kasus positif COVID-19 di Indonesia tercatat mencapai 506.302 kasus dengan penambahan hingga 23 November 2020 yakni sejumlah 4.192 kasus baru. Sedangkan, jumlah kasus meninggal dunia yakni sejumlah 16.111 orang atau sebesar 3,182% dari kasus yang telah terkonfirmasi (covid19.go.id).

Berdasarkan data yang dilansir dalam covid19.go.id, terdapat beberapa provinsi yang tercatat memiliki kasus terkonfirmasi positif COVID-19 cukup banyak diantaranya yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Hingga Senin (23/11/2020), DKI Jakarta tercatat jumlah total terkonfirmasi positif COVID-19 yakni sebesar 129.188 kasus dengan jumlah total kasus meninggal dunia sebanyak 2.561. Selanjutnya, Jawa Timur tercatat jumlah total terkonfirmasi positif sebesar 59.398 kasus dengan jumlah total kasus meninggal dunia sebanyak 4.215 orang. Sementara itu, Sulawesi Selatan tercatat jumlah total terkonfirmasi positif sebesar 20.091 kasus dengan jumlah total kasus meninggal dunia sebanyak 488 orang (covid19.go.id). Melihat akan cukup banyaknya kasus terkonfirmasi positif COVID-19, khususnya pada DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, hal ini lah yang menjadi faktor utama kami dalam memilih ketiga provinsi tersebut.

Peningkatan kasus positif COVID-19 di Indonesia direspon pemerintah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang diharapkan mampu mengendalikan kasus positif COVID-19 tersebut. Pada awal terjadinya kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah cukup tanggap dalam merespon hal tersebut dengan mengeluarkan instruksi berupa karantina wilayah, jaga jarak ketika bepergian, pelaksanaan *Work From Home (WFH)*, kebijakan belajar di rumah bagi mahasiswa dan pelajar, dan berbagai kebijakan lainnya (Liputan6, 2020). Selain itu, pemerintah pusat pada 31 Maret 2020 juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bertujuan untuk Percepatan Penanganan COVID-19. Peraturan Pemerintah tersebut mengarahkan pemerintah daerah untuk melakukan PSBB di wilayahnya. PSBB yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan melalui usulan Gubernur/Bupati/Walikota kepada Menteri Kesehatan. Pemerintah Pusat juga memberikan kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk menerapkan berbagai kebijakan penanganan COVID-19 yang sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Namun, berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut dinilai terlambat dan mendapatkan kritik dari pakar epidemiologi di Australia karena kasus positif COVID-19 di Indonesia terus melonjak tinggi setiap harinya (Tirto, 2020).

Jumlah kasus positif COVID-19 yang semakin meningkat berdampak pada persepsi masyarakat terhadap upaya yang dilakukan pemerintah provinsi dalam

menangani COVID-19. Persepsi merupakan sebuah proses menginterpretasikan dan mengorganisasikan kesan yang dirasakan seseorang dalam rangka memberikan pemaknaan tertentu terhadap lingkungannya (Siagian, 1989). Persepsi muncul ketika panca indra seseorang menerima suatu rangsangan dari berbagai hal yang terjadi di sekitarnya. Salah satu jenis persepsi yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah menurut Grimmelikhuijsen dan Knies (2015) yaitu *perceived benevolence* atau kebajikan yang mengukur sejauh mana warga negara memandang atau mempersepsikan pemerintah mengenai kepeduliannya pada kesejahteraan publik dan termotivasi untuk bertindak atas kepentingan umum. Kebajikan atau kebajikan tersebut ditunjukkan dengan tindakan pemerintah dalam membantu warga negaranya meskipun tidak terdapat imbalan ekstrinsik atas hal tersebut. Jika kinerja yang dilakukan pemerintah baik, maka persepsi masyarakat terhadapnya juga baik (tinggi), khususnya dalam hal kebajikan dalam memberikan pelayanan. Sebaliknya, jika pelayanan yang diberikan tidak baik, maka persepsi masyarakat juga buruk (rendah). Persepsi masyarakat mengenai kebajikan pemerintah (*benevolence*) meliputi dua indikator, yaitu *caring and concern* dan *fairness* atau keadilan dalam pemberian layanan (Grimmelikhuijsen dan Knies, 2015).

Berkaitan dengan penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, masyarakat tentunya memiliki berbagai persepsi yang berbeda. Salah satu persepsi masyarakat tersebut yaitu dilihat berdasarkan kebajikan (*benevolence*) yang dilakukan oleh pemerintah provinsi terkait penanganan COVID-19. Adanya *perceived benevolence* masyarakat tersebut mengindikasikan baik tidaknya pemerintah provinsi dalam menangani COVID-19 di daerahnya. Oleh karena itu, maka penelitian ini berusaha menganalisis persepsi masyarakat terhadap kebajikan pemerintah provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan dalam menangani COVID-19 sehingga dapat diketahui lebih jauh mengenai kualitas penanganan yang diberikan dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah provinsi terkait.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kebajikan pemerintah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan dalam penanganan COVID-19. Pendekatan kuantitatif tersebut dapat dilihat dari kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, penalaran deduktif. Menurut Santrock (2010), penalaran deduktif adalah penalaran yang dilakukan dari kategori umum ke khusus. Sejalan dengan hal tersebut, Mundiri (2000) menyatakan bahwa penalaran deduktif sebagai pola pikir yang didasarkan pada sebuah asumsi yang bersifat umum guna mencapai kesimpulan yang bersifat khusus.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni *mix method* dengan menggabungkan teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Teknik

pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan survei yang berupa penyebaran kuesioner secara *online* baik kepada warga DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan guna mengumpulkan data dari narasumber dengan memberikan pertanyaan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya guna memperkaya data yang diperoleh, teknik pengumpulan data kualitatif juga turut digunakan yang berupa studi literatur terkait informasi mengenai persepsi masyarakat terhadap pemerintah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan dan berupa wawancara oleh narasumber guna menguji ketepatan dan kebenaran data yang diperoleh.

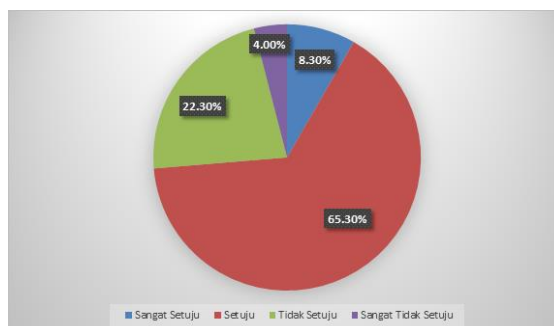
Populasi yang menjadi target teliti yakni penduduk yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan dengan batas minimal usia telah genap 17 tahun yang dianggap telah mampu memahami kebijakan pemerintah dan telah mampu menginterpretasikan persepsinya terhadap pemerintah. Adapun dalam penelitian ini, penarikan sampel yang dilakukan menggunakan *non probability sampling* dikarenakan terdapat beberapa hambatan dalam menentukan kerangka sampel. Unit analisis dalam penelitian ini yakni masyarakat yang tinggal di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan selama masa pandemi COVID-19 berlangsung. Selanjutnya, unit observasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni individu masyarakat yang bertempat tinggal di DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan dengan keseluruhan jumlah sampel sejumlah 300 responden yang kemudian diwakilkan oleh 100 responden per provinsi terkait. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan berupa kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data kuantitatif yang digunakan adalah analisis univariat karena hanya menggunakan satu variabel saja, yakni Persepsi Masyarakat mengenai Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan dalam penanganan COVID-19. Selain itu, teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam menganalisis data adalah *illustrative methods*, yaitu strategi analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mengisi bagian kosong dalam sebuah teori yang didasarkan pada bukti empiris (Neuman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi masyarakat merupakan aspek yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Munculnya berbagai persepsi menjadi salah satu indikator akan keberhasilan kinerja pemerintah dalam suatu negara. Jika kinerja pemerintah baik, maka persepsi yang berkembang dalam masyarakat merupakan persepsi positif. Sebaliknya, jika kinerja pemerintah dinilai kurang optimal, maka persepsi masyarakat yang berkembang merupakan persepsi negatif sehingga pemerintah harus melakukan upaya perbaikan pada kinerja yang belum optimal tersebut. Berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya pada provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, Pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya penanganan guna meminimalisir dampak negatif yang dihasilkan.

Ketiga provinsi tersebut, telah melakukan berbagai upaya dalam penanganan COVID-19 yaitu diantaranya pemberlakuan PSBB, himbauan untuk tidak mudik, adanya kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah guna penyediaan alat kesehatan, sosialisasi penanganan jenazah yang terkena COVID-19, hingga penyediaan hotel gratis untuk tempat karantina bagi pasien positif COVID-19. Pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut menghasilkan persepsi dalam masyarakat, khususnya dari sisi kebajikan pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Grimmelikhuijsen dan Knies (2015). Persepsi dari sisi kebajikan tersebut selanjutnya digambarkan melalui dua indikator yaitu *caring and concern* dan *fairness* yang diturunkan menjadi beberapa pertanyaan untuk responden berikut ini.

Berkaitan dengan persepsi masyarakat mengenai kesiapan pemerintah provinsi dalam menyediakan pelayanan kesehatan dapat ditunjukkan melalui gambar di bawah ini:



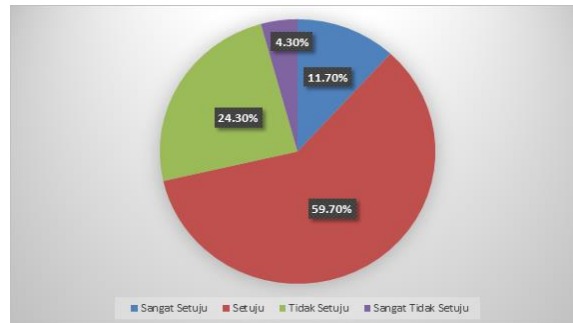
Gambar 1.1 Kesiapan Pemerintah Provinsi Menyediakan Pelayanan Kesehatan (n=300)

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2020

Berdasarkan hasil olahan data peneliti terkait kesiapan pemerintah provinsi menyediakan pelayanan kesehatan, menunjukkan bahwa mayoritas responden di wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan yakni sebanyak 196 responden (65,3%) menjawab “Setuju” yang menyatakan bahwa masyarakat percaya pemerintah provinsi telah sigap dalam menyediakan pelayanan kesehatan. Sedangkan terdapat sebanyak 67 responden (22,3%) menjawab “Tidak Setuju”, 25 responden (8,3%) menjawab “Sangat Setuju”, sementara lainnya yakni sebanyak 12 responden (4,0%) menjawab “Sangat Tidak Setuju”.

Dalam hal ini, Muhammad Thufail Ali Rahman selaku salah satu responden yang berasal dari Sulawesi Selatan menyatakan bahwa di awal masa pandemi Covid-19 yang marak di Indonesia, pemerintah telah memberikan pelayanan kesehatan dengan sigap. Hal ini dibuktikan dengan pernyataannya bahwa secara keseluruhan kebijakan pemerintah telah dipersiapkan dengan baik, meskipun awalnya terlihat sedikit kebingungan. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah telah dapat mengatasi hal tersebut (Wawancara dengan Muhammad Thufail Ali Rahman, responden). Kesiapan pemerintah provinsi dalam menyediakan pelayanan kesehatan, menunjukkan bahwa pemerintah provinsi

bersungguh-sungguh dalam menangani COVID-19. Dengan adanya pelayanan kesehatan yang baik, hal tersebut akan meningkatkan jumlah pasien yang sembuh.

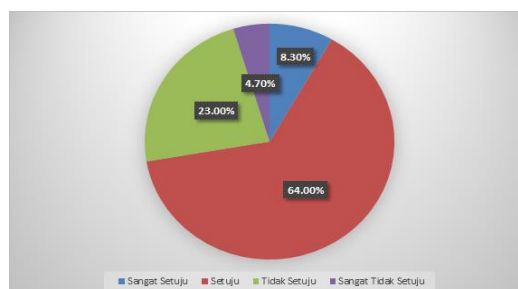


Gambar 1.2 Pemerintah Provinsi Tidak Diskriminatif dalam Memberikan Pelayanan (n=300)

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2020

Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai tindakan pemerintah provinsi yang tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kesehatan dalam penanganan COVID-19. Berdasarkan hasil olah data peneliti hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden di wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan yakni sebanyak 179 responden (59,7%) menjawab “Setuju”, sedangkan terdapat sebanyak 73 responden (24,3%) menjawab “Tidak Setuju”, 35 responden (11,7%) menjawab “Sangat Setuju”, dan sisanya sebanyak 13 responden (4,3%) menjawab “Sangat Tidak Setuju”.

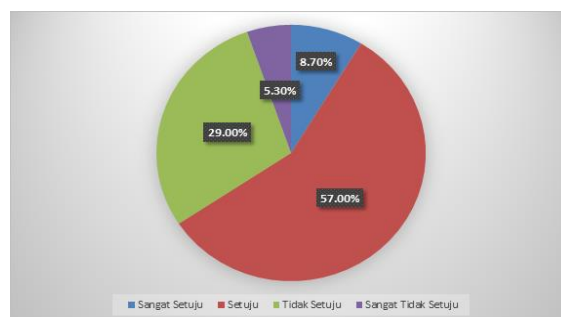
Dalam wawancara bersama Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia, Dr. Ir. H. Zakir Sabara juga mendukung pernyataan bahwa Pemerintah Provinsi khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah cukup baik dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan, terbukti bahwa pelayanan terkait Covid-19 sudah diterapkan secara adil dan merata. Selain itu, dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai program Wisata Covid sebagai salah satu strategi utama penanganan Covid-19 di Sulawesi Selatan dengan memanfaatkan hotel sebagai tempat isolasi guna mengurangi beban perawatan fasilitas kesehatan (Wawancara dengan Dr. Ir. H. Zakir Sabara, Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia, Kamis, 1 Oktober 2020). Hotel tersebut dapat digunakan oleh seluruh pasien positif tanpa memandang tingkat ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Tidak hanya itu, program tersebut juga dinilai dapat meningkatkan angka kesembuhan kasus positif Covid-19 di Sulawesi Selatan hingga mencapai 72,6% (makassar.sindonews.com, 2020).



Gambar 1.3 Pemerintah Provinsi Memperhatikan Kesehatan Tenaga Medis (n=300)

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2020

Lalu, pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai bagaimana pemerintah provinsi memperhatikan kesehatan tenaga medis dalam menangani Covid-19, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Berdasarkan grafik 5.3.4 bahwasannya dari 300 responden sebanyak 192 responden (64%) memilih setuju bahwa pemerintah provinsi telah memperhatikan kesehatan tenaga medis. Sedangkan, sebanyak 69 responden (23%) menjawab tidak setuju, 24 responden (8%) menjawab sangat setuju, dan 15 responden (5%) menjawab sangat tidak setuju. Bentuk perhatian pemerintah provinsi terhadap kesehatan tenaga medis dapat dilihat dari ketersediaan APD atau Alat Pelindung Diri. Menurut Drg. Masyitoh selaku Ahli Manajemen Rumah Sakit Universitas Indonesia dan Ahli Kebijakan Kesehatan, pemerintah provinsi sudah berusaha secara maksimal dalam penyediaan APD mulai dari baju hazmat yang dapat dipakai oleh tenaga medis maksimal selama delapan jam, masker, *face shield*, dan lain sebagainya. Akan tetapi, ketersediaan barang yang langka menjadi faktor utama dalam permasalahan kurangnya APD untuk tenaga medis di awal pandemi COVID-19. Selain itu, pemerintah provinsi juga terus menggenjot ketersediaan APD hal tersebut dilakukan guna mendukung terciptanya keselamatan pada tenaga medis karena banyaknya tenaga medis yang berguguran padahal mereka merupakan tulang punggung keluarga masing-masing (Wawancara dengan Drg. Masyitoh, Ahli Manajemen Rumah Sakit Universitas Indonesia dan Ahli Kebijakan Kesehatan, Jumat, 25 September 2020). Semakin berkurangnya tenaga medis yang bertugas, akan menyebabkan upaya penanganan COVID-19 menjadi tidak optimal. Terlebih jumlah pasien positif COVID-19 kian bertambah setiap harinya dan tidak sebanding dengan jumlah tenaga medis yang ada.

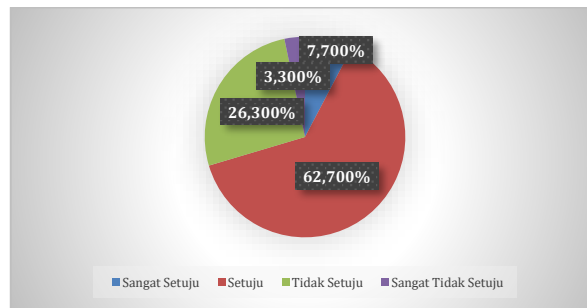


Gambar 1.4 Pemerintah Provinsi Memperhatikan Kesejahteraan Tenaga Medis (n=300)

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2020

Pertanyaan yang diajukan pada responden selanjutnya yaitu berkaitan dengan upaya pemerintah provinsi dalam memperhatikan kesejahteraan tenaga medis. Berdasarkan hasil olah data peneliti, responden menyatakan setuju bahwa

pemerintah provinsi sudah memperhatikan kesejahteraan tenaga medis sebanyak 171 responden (57%), sedangkan tidak setuju sebanyak 87 responden (29%). Pemberian insentif kepada tenaga medis merupakan bentuk pemerintah provinsi memperhatikan kesejahteraan tenaga medis, hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/392/20202 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi petugas yang menangani COVID-19. Akan tetapi, seringkali penerapan di lapangan tidak seindah perkiraan di awal, seperti yang disampaikan oleh Drg. Masyitoh dalam wawancara mendalam pada 25 september 2020. Beliau menyatakan bahwa insentif yang diberikan kerap kali tidak sesuai dengan dokumen yang dirancang karena untuk pencairan dana mengalami keterlambatan sehingga baru dapat dicairkan setelah beberapa bulan sekali dan prosesnya memakan waktu yang panjang serta melibatkan berbagai pihak (Wawancara dengan Drg. Masyitoh, Ahli Manajemen Rumah Sakit Universitas Indonesia dan Ahli Kebijakan Kesehatan, Jumat, 25 September 2020). Selanjutnya, menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur, pemberian insentif tidak perlu dibedakan. Insentif harus diberikan secara merata kepada rumah sakit rujukan COVID-19 baik swasta atau pemerintah, selain itu pemberian insentif tidak hanya diberikan kepada tenaga medis melainkan tenaga non medis yang terlibat untuk menangani COVID-19 harus diberikan.



Gambar 1.5 Pemerintah Telah Menyediakan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Para Tenaga Medis (n=300)

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2020

Pertanyaan terakhir yang diajukan pada responden yakni mengenai bagaimana penyediaan yang telah diberikan pemerintah khususnya dalam pendidikan dan pelatihan bagi para tenaga medis, khususnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa sebanyak 188 responden (62,70%) yang tersebar di DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan menjawab setuju, sementara sebanyak 23 responden (7,70%) menyatakan sangat setuju, 79 responden (26,30%) menyatakan tidak setuju, dan 10 responden (3,30%) menyatakan sangat tidak setuju. Dalam wawancara bersama Fahira selaku masyarakat yang bertempat

tinggal di DKI Jakarta juga mendukung pernyataan bahwa Pemerintah Provinsi khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah cukup baik dalam menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi para tenaga medis. Hal ini dibuktikan dengan koordinasi pemerintah provinsi dengan pihak tenaga medis dalam memberikan pelayanan terkait dengan COVID-19 sudah cukup baik.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan dalam penanganan COVID-19 adalah positif. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti dan berbagai penemuan lain yang memperkuat pernyataan terkait. Dari semua pertanyaan yang diajukan, mayoritas responden menyetujui bahwa penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi jika dilihat dari sisi kebijakan sudah cukup baik. Selain itu, persepsi positif responden terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi di DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan penanganan COVID-19 juga tergolong tinggi, yakni mencapai 72% dari total keseluruhan responden.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis kepada Fakultas Ilmu Administrasi karena berkat bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang memiliki peran besar dan terlibat. Kami juga turut mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Eko Prasajo, mag. rer. publ., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia;
2. Desy Hariyati, S.Sos., M.A., dan Muhamad Iman Alfie Syarien, S.Sos., MPA selaku Dosen Kelompok Metode Penelitian Administrasi Negara 3;
3. Hisyam Yusril Hidayat selaku Asisten Mahasiswa Kelompok Metode Penelitian Administrasi Negara 3;
4. Drg. Masyitoh, Ahli Manajemen Rumah Sakit Universitas Indonesia dan Ahli Kebijakan Kesehatan;
5. Dr. Ir. H. Zakir Sabara, Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia;
6. Muhammad Thufail Ali Rahman, responden dari Sulawesi Selatan;
7. Fahira, responden dari DKI Jakarta;
8. Teman-teman kelompok Metode Penelitian Administrasi Negara 3, Orang tua, dan pihak-pihak lainnya.

KONTRIBUSI PENULIS

Setiap anggota memiliki peran masing-masing dalam berkontribusi di dalam pengerjaan PKM AI. Ketua pelaksana berperan dalam mengkoordinir setiap tugas, mengolah data, dan menganalisis data. Anggota pertama berperan dalam hal

pengurusan perizinan, menganalisis data, dan perizinan serta hubungan masyarakat. Anggota kedua berperan dalam mengolah data, mengumpulkan, dan menganalisis data. Sedangkan, dosen pembimbing selaku penulis terakhir berperan dalam membimbing, mengarahkan, dan memberi masukan dalam penyusunan penulisan PKM AI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mundiri. Logika. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2000

Santrock, John W. 2010. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Siagian, Sondang P. 1989. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Bina Aksara

Thoha, M. 1999. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Grafindo Persada.

Jurnal

Grimmelikhuijsen, S., & Knies, E. (2017). Validating a scale for citizen trust in government organization. *International Review of Administration Science*, 83(3), 583-601.

Mayer, R.C., Davis, J.H., & Schoorman, F.D. (1995). An integrative model of organizational trust. *Academy of Management Review*, 20(3), 709–734.

Media massa

Hidayat, R. (2020, Maret 9). Teledor Penanganan Wabah COVID-19 di Indonesia. 12 April 2020. Dikutip dari <https://tirto.id/teledor-penanganan-wabah-covid-19-di-indonesia-eDPG>

Kompas.com. (2020, November 24). Data Covid-19 di Indonesia Update Terakhir: 24 November 2020, 16.36 WIB. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/covid-19>

Prastiwi, D. (2020). Imbauan Jokowi terkait Covid-19, dari Kerja dari Rumah hingga Ingatkan Social Distancing. 1 April 2020. Dikutip dari <https://www.liputan6.com/news/read/4202629/imbauan-jokowi-terkait-covid-19-dari-kerja-dari-rumah-hingga-ingatkan-social-distancing>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pembimbing

Biodata Ketua

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Aulia Utami Dikayarizqi
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Program Studi	Ilmu Administrasi Negara
4.	NPM	1806216524
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 25 Oktober 2000
6.	Alamat Email	aulia.utami@ui.ac.id
7.	Nomor Telepon/HP	089694804694

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang sedang/pernah diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1.	BK MWA UI UM 2019	Staff Media	2019, Universitas Indonesia
2.	BK MWA UI UM 2020	Wakil Kepala Bidang Media	2020, Universitas Indonesia

C. Penghargaan yang pernah diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan **PKM-AI**.

Depok, 15 Maret 2021

Ketua Tim

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, representing the name Aulia Utami Dikayarizqi.

(Aulia Utami Dikayarizqi)

Biodata Anggota Ke-1

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Nur Harfi Oktaviani
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Program Studi	Ilmu Administrasi Negara
4.	NPM	1806240126
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 14 Oktober 2000
6.	Alamat Email	nur.harfi@ui.ac.id
7.	Nomor Telepon/HP	0895337793140

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang sedang/ pernah diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1.	Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMANERA)	Staff Event Internal	2020, Departemen Ilmu Administrasi Negara

C. Penghargaan yang pernah diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan **PKM-AI**.

Depok, 15 Maret 2021

Anggota Tim

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nur Harfi Oktaviani'.

(Nur Harfi Oktaviani)

Biodata Anggota Ke-2

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Siti Amalia
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Program Studi	Ilmu Administrasi Negara
4.	NPM	1806216493
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Tegal, 13 November 1999
6.	Alamat Email	siti.amalia81@ui.ac.id
7.	Nomor Telepon/HP	087825839527

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang sedang/ pernah diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1.	Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) 2019	Staff Divisi Penelitian dan Pengembangan	2019, Fakultas Ilmu Administrasi
2.	Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) 2020	Wakil Ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan	2020, Fakultas Ilmu Administrasi

C. Penghargaan yang pernah diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan **PKM-AI**.

Depok, 15 Maret 2021

Anggota Tim

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

(Siti Amalia)

Biodata Dosen Pendamping

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Desy Hariyati, S.Sos., M.A.
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Program Studi	Ilmu Administrasi Negara
4.	NIP/NIDN	198712222019094001
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	22 Desember 1987
6.	Alamat Email	desy.hariyati@gmail.com
7.	Nomor Telepon/HP	081281368787

B. Riwayat Pendidikan

	Sarjana	S2/Magister
Nama Institusi	Universitas Indonesia	Universität Osnabrück, Germany
Jurusan	Ilmu Administasi Negara	Mater of Arts in Democratic Governance and Civil Society
Tahun masuk-lulus	2005-2009	2014-2016

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT

Pendidikan/Pengajaran

No	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1	Metode Penelitian Administrasi	Wajib	3
2	Birokrasi dan Tata Kelola	Wajib	3
3	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Wajib	3
4	Pengantar Ilmu Administrasi Publik	Wajib	3
5	Filsafat dan Etika	Wajib	3

6	Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	Wajib	3
7	Sistem Administrasi Indonesia	Wajib	3

Penelitian

No	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1.	Government Trust in Citizen in Supporting the Policy of Covid-19 Mitigation: Study in Jakarta and East Java (in Bahasa)	Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia	2020
2.	Joint Research of Strategic Management Implementation in Indonesia and Brazil	Kementerian PAN-RB	2020
3	Intergovernmental Relation in Handling the Pandemic of Covid-19	Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia	2020
4	Woman Role in Public Infoemation Disclosure	Dikti	2020
5	Public Sector Reform Trajectories in Indonesia from the New Order Regime untul Reform Era	Dikti	2020
6	Strengthening Local Values within Village Governance: Lesson Learned from Saemaul Undong Movement in South Korea	Dikti	2019
7	The Role of Civil Society in Strengthening Public Information Disclosure and Its Impacts on Corruption Prevention	Dikti	2019
8	Organizational Mapping of Higher Education Service Unit (LLDIKTI) to Strengthen its Role in Managing Junior Researcher	Dikti	2019

9	Strengthening International Cooperation in Supporting Joint Research and Publication between Indonesia and Other Countries	Dikti	2019
10	Exploring Asian Values: Sufficient and Necessary Conditions for Successful Public Sector Reform (Study in Japan and South Korea)	Dikti	2018
11	Strengthening Local Values within Village Governance: Lesson Learned from Village Development through “Jimoto-Gaku” in Japan	Dikti	2018
12	Strengthening Local Values within Village Governance: the Implementation of Village Autonomy in Sharia-based Province of Aceh and Javanese Value-based of Yogyakarta	Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia	2017
13	Exploring Non-Western Public Administration in the Local Governments of Indonesia	Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia	2017
14	The Sustainability of Public Sector Innovation in the Framework of Administrative Law	Universitas Indonesia	2013
15	Innovative Governance for Transportation Management in DKI Jakarta Province	USAID	2013
16	The Role of Local Elected Official in Bureaucratic Reform (Study in Surabaya City)	Departemen Ilmu Administrasi, FISIP Universitas Indonesia	2013
17	The Japanese Localogy “Jimoto-Gaku” Manifestation in Indonesia: Cases from Post-Recovery Municipalities	Dikti	2012
18	Public Participation in Democratic Governance Practices at Local Level:	Dikti	2012

	Cases from Recent New Regencies		
19	Analysis on Procurement Process in State-owned Enterprises in Indonesia	LKPP	2012
20	Developing Local Society and Competencies: Evidence from “Localogy” Implementation in Japan as Learning Model for Local Development in Indonesia	Sumitomo Foundation	2011
21	Study on The Implementation of Law No. 14 Year 2008 about The Disclosure of Public Information	Universitas Indonesia	2011
22	Study on the Planning Development for Regional Proliferation in South Halmahera	Kabupaten Halmahera Selatan	2012
23	The Problems of Local Governance in New Autonomous Regions and Their Impacts”, Study in Bandung Barat Regency and Singkawang City	Universitas Indonesia	2010
24	Governance of Public Service Delivery in Jakarta: Study on Building Permit, Housing, and Waste Management	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	2010
25	Local Investment License Service: Best Practice from Purbalingga Regency, Makassar City, and Banjar Baru Regency	Masyarakat Transparansi Indonesia	2010
26	Neopatrimonialism and Governance Reform in Indonesia: Collaboration between German Institute of Global Area Studies (GIGA) Hamburg and Universitas Indonesia	GIGA Hamburg, Jerman	2009
27	Local Executive Election Conflicts and Its Implication on Good Governance Implementation in Local Government	Departemen Ilmu Administrasi, FISIP Universitas Indonesia	2009

28	Best Practice of Traditional Market Revitalization: Analysis on Multistakeholder Partnerships", Study in Sragen Regency	-	2009
----	---	---	------

Pengabdian kepada Masyarakat

No	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Dikti	2018
2	Praktik Penggunaan Evidence-based Policy bagi Pemerintah Daerah	Dikti	2018
3	Advokasi Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	Dikti	2017
4	Gerakan anti korupsi dan pemberdayaan pemuda	Masyarakat Transparansi Indonesia	2010

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan **PKM-AI**.

Depok, 15 Maret 2021

Dosen Pendamping



(Desy Hariyati, S.Sos., M.A.)

Lampiran 2. Keterangan Kontribusi Anggota Tim dalam Pekerjaan dan Penulisan

No	Nama	Posisi penulis	Bidang Ilmu	Kontribusi
1.	Aulia Utami Dikayarizqi	Penulis pertama	Ilmu Administrasi Negara	Mengkoordinir setiap tugas, mengolah data, menganalisis data
2.	Nur Harfi Oktaviani	Penulis kedua	Ilmu Administrasi Negara	Mengurus perizinan, menganalisis data, perizinan dan hubungan masyarakat
3.	Siti Amalia	Penulis ketiga	Ilmu Administrasi Negara	Mengolah data, mengumpulkan, menganalisis data
4.	Desy Hariyati, S.Sos., M.A.	Pembimbing	Ilmu Administrasi Negara	Membimbing, mengarahkan, dan memberi masukan dalam penyusunan penulisan PKM AI

Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PELAKSANA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aulia Utami Dikayarizqi
NPM : 1806216524
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Administrasi

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-AI saya dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan dalam Penanganan COVID-19 yang diusulkan untuk tahun anggaran 2021 adalah asli karya kami dan belum pernah dibiayai lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan benar-benarnya.

Depok, 15 Maret 2021

Yang menyatakan,



(Aulia Utami Dikayarizqi)

NPM. 1806216524

Lampiran 4. Pernyataan Sumber Tulisan

SURAT PERNYATAAN SUMBER TULISAN PKM-AI

Saya yang menandatangani Surat Pernyataan ini:

Nama : Aulia Utami Dikayarizqi

NPM : 1806216524

1. Menyatakan bahwa PKM-AI yang saya tuliskan bersama anggota tim lainnya benar bersumber dari kegiatan yang telah dilakukan:
 - a. Aplikasi Metode Penelitian FIA UI 2020
 - b. Penelitian Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan Dalam Penanganan COVID-19
 - c. Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, 2020
2. Naskah ini belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dalam bentuk prosiding maupun jurnal sebelumnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan pihak manapun juga untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 15 Maret 2021

Yang membuat pernyataan,



(Aulia Utami Dikayarizqi)

NPM. 1806216524